

# PERAN PENDAMPINGAN LOKAL KEPALA KAMPUNG DALAM PENGELOLAAN ADKK DI KAMPUNG WALESAKMA DISTRIK HILIPUK KABUPATEN YAHUKIMO

NELINUS KOBAK  
PATAR RUMAPEA  
NOVIE R. A. PALAR

*Penelitian ini berangkat dari fenomena bahwa penyelenggaraan pemerintah kampung di kampung Walesakma Distrik Hilipuk Kabupaten Yahukimo terindikasi belum efektif. Kondisi ini di duga ada kaitannya dengan beberapa faktor penghambat. Dengan demikian, penelitian bertujuan :(1). Untuk mengetahui peran pendampingan lokal kepala kampung dalam pengelolaan ADKK dan (2). Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pencapaian peran pendampingan lokal kepala kampung dalam pengelolaan ADKK di kampung walesakma Distrik Hilipuk Kabupaten Yahukimo*

*Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penerapan metode Deskriptif. Data dan informasi di kumpulkan melalui teknik wawancara kepada 15 informan, dan di lengkapi dengan teknik observasi dan dokumentasi, kemudian di analisis dengan menerapkan teknik analisis deskriptif.*

*Berdasarkan hasil analisis data, di ketahui bahwa: Peran pendamping kepala kampung, Khusus Di Kampung Walesakma Distrik Hilipuk Kabupaten Yahukimo pada umumnya belum berjalan secara efektif. Kondisi ini dapat di lihat dari realitas hasil wawancara dimana ke kriteria peran pendamping lokal pemerintah kepala kampung belum terimplementasi dengan maksimal.*

*Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat yaitu: faktor aksesibilitas yang rendah, jumlah dan mutu SDM aparat pemerintah kampung yang kurang memadai, serta masih kentalnya nilai budaya paternalistik yang mewarnai aktivitas masyarakat, terutama aparat pemerintah kampung sehingga melahirkan budaya paternalistik sebagai penghambat pencapaian peran pendamping dalam pembangunan kampung oleh karena itu, di sarankan kepada pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo agar perlu melakukan pembenahan di beberapa sektor, antar lain : jaringan transportasi darat, sarana-prasarana, peralatan, fasilitas penunjang dan anggaran penyelenggaraan alokasi dana kepala kampung ADKK, peningkatan mutu dan jumlah sumber daya aparat pemerintah kampung serta membangun sistem budaya yang berorientasi pencapaian hasil melalui pembinaan keagamaan.*

**Kata Kunci:** Peran Pendampingan Lokal Kepala Kampung/Desa

## PENDAHULUAN

Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa di bentuknya pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah masing-masing provinsi atau kota. Daerah provinsi/kota tersebut dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah dan dari daerah ke kepala kampung yang diatur dengan Undang-Undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota atau antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selain itu Negara mengakui kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi

daerah. Karena itu, implementasi pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sistem pemerintah telah memberikan keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Peran

Mengacu pada beberapa pendapat para ahli tentang “organisasi” maka dapat di katakana bahwa pengertian atau konsep organisasi yang di kemukakan apabila yang di kaitkan dengan karakteristik organisasi pemerintahan kepala kampung atau pemerintahan kampung.

Kaitannya dengan peran pendampingan lokal kepala kampung dalam pengelolaan ADKK di kampung maka, organisasi dapat di

konsepsikan sebagai kumpulan dari individu dan sekelompok orang di kampung.

Kepala kampung Walesakma adalah pembagian wilayah administratif di Provinsi Papua, Indonesia. Yang sebelumnya digunakan seperti halnya di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Penetapan ini menyusul diterapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Kabupaten Yahukimo. Distrik Hilipuk kepala kampung walesakma merupakan perangkat Daerah Kabupaten atau Kota, di Papua yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Bupati atau disebut Kepala Daerah. Dibagi lagi menjadi sejumlah distrik/kecamatan dan dari distrik ke kepala kampung, atau dengan nama lain sesuai dengan adat istiadat setempat.

### **Pendampingan Kepala Kampung**

Selama ini banyak orang yang mempertanyakan apa sebenarnya fungsi dan tugas pendamping kepala kampung. Pendamping kepala kampung seringkali digambarkan sebagai pekerjaan yang 'santai' dengan gaji yang lumayan besar. Banyak orang mengira bahwa dengan menjadi pendamping kepala kampung maka akan banyak waktu santai dan makan gaji buta.

Padahal menjadi pendamping kepala kampung adalah tugas yang sangat berat. Mengingat kampung sebagai tiang pembangunan ekonomi Negara maka banyak sekali hal yang harus dikerjakan oleh para pendamping kepala kampung selama bertugas di kampung yang didampinginya.

### **Dalam Pengelolaan Dana ADKK**

Kini berita gembira tentang perhatian pemerintah yang mengalirkan dana besar bagi pembangunan kepala kampung, membawa perubahan paradigma bahwa kini sumber uang ada di kepala kampung. Keluhan selama ini bahwa kepala kampung itu kekurangan dana, keterbatasan sumber daya manusia, kini perlahan bisa teratasi. Potensi kampung perlahan akan diberdayakan. Dana tersebut

jika dialokasikan secara tepat sesuai dengan potensi kampung maka konsep one village one product, atau bahkan one village multi product dapat direalisasikan karena dengan dana yang ada dapat digunakan untuk membangun jalan produksi, memperlancar arus distribusi, sehingga petani bisa beraktivitas ke kawasan pertanian seperti yang dipraktekkan di daerah-daerah pedalaman. Apalagi jika para pemuda yang kini masih bercokol di kota, mencari pekerjaan dengan penghasilan yang tidak memadai dapat terpanggil untuk pulang ke kampung, untuk membangun kampung sendiri.

### **Penggunaan Alokasi Dana Kepala Kampung**

Penggunaan ADKK untuk pemberdayaan masyarakat pada kepala kampung walesakma yaitu sejumlah Rp. 102.417.000, -. Dalam bidang penanggulangan kemiskinan, penggunaan dana di gunakan untuk biaya operasional pendistribusian raskin, program berbeda rumah dan program membangun kantor kepala kampung,

Labter atau lapangan terbang yang sementara kerja sama dengan kepala kampung bersama masyarakat.

Jalan parkaria dari masing-masing kampung menuju ke Kantor Distrik, Fasilitasi penyusunan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang peraturan Kepala Kampung untuk hal-hal strategis di Kampung, Fasilitasi masyarakat Kampung menyampaikan aspirasi dalam penyusunan peraturan Kepala Kampung (Desa). Fasilitasi pelaksanaan penyusunan peraturan Kepala Kampung secara partisipasi, partisipatif, dan demokratis, pelatihan teknis, penyusunan peraturan Kepala Kampung.

### **Sarana dan Para Sarana Di Bidang Keagamaan**

Sedangkan anggaran ADKK untuk bidang keagamaan digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana keagamaan. Pemberdayaan dalam bidang budaya, kepala kampung

walesakma menganggarkan sebagian dana ADKK digunakan untuk menunjang budaya gotong-royong dan keswadayaan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa budaya gotong-royong dan masyarakat sangat tinggi, hal tersebut terlihat pada saat ada kegiatan kerja bakti dalam membangun rumah warga miskin, yang mendapatkan bantuan program bedah rumah yang didanai ADKK. Pengalokasian ADKK di kepala kampung walesakma dalam pembangunan infrastruktur kepala kampung dalam menunjang percepatan pemberdayaan masyarakat.

### **Pengawasan Alokasi Dana Kepala Kampung**

Pengawasan dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku berdasarkan terhadap pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan. Pengawasan pengelolaan ADKK secara fungsional yakni pengawasan oleh aparat pengawas atau satuan organisasi pemerintah Kabupaten Yahukimo maupun Distrik Hilipuk yang menyelenggarakan pengawasan. Berdasarkan pengamatan peneliti, pengawasan secara fungsional pada kepala Kampung Walesakma yang berupa pelaporan yang seharusnya dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ), namun pada pelaksanaannya hanya dilakukan 3 kali dalam satu tahun.

### **Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kepala Kampung**

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah kepala kampung. Dilihat dari bentuk pertanggungjawaban, pada kepala kampung walesakma cenderung bersifat administratif. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah kepala kampung atas kegiatan pelaksanaan ADKK secara administratif berupa Surat Pertanggung-Jawaban (SPJ) ADKK

atas pengawasan Kepala Distrik kepada Bupati melalui Bagian Tata Pemerintahan Kepala Kampung Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan kepala kampung, bahwa pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan ADKK. Pelaporan dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala kampung kepada kepala Distrik, kemudian oleh kepala distrik diteruskan Kepada Bupati. Namun dalam pelaksanaannya, pertanggungjawaban ADKK pada kepala kampung hanya dilakukan hanya 3 kali dalam tahunan yakni pada saat untuk pencairan ADKK tahap selanjutnya dan tahun selanjutnya bahkan pada awal diimplementasikan program ADKK pertanggungjawaban hanya dilakukan pada akhir tahun. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa belum terjadi pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat

### **Kajian Strategi Penguatan Partisipasi Dan Kapasitas Kepala Kampung Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Kepala Kampung (ADKK)**

Kajian strategi penguatan partisipasi dan kapasitas Kepala Kampung dalam pengelolaan Alokasi Dana Kepala Kampung (ADKK) adalah dilakukan di Kepala Kampung Walesakma Atas bertujuan untuk mengkaji kebijakan ADKK di Kabupaten Yahukimo, mengetahui implementasi pengelolaan ADKK dan merancang strategi pengelolaan ADKK. Metode kajian yang digunakan adalah metode kualitatif, dan diperkuat pula dengan analisis data kuantitatif. Perancangan strategi menggunakan analisis (SWOT) (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats). Kebijakan pengelolaan ADKK di Kabupaten Yahukimo diatur dalam bentuk:

- (1) Surat Keputusan Bupati Yahukimo tentang Penetapan Besarnya Perhitungan

Alokasi Dana Kepala Kampung Kabupaten Yahukimo dan Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Kepala Kampung yang terbit setiap tahun anggaran;

#### **a. Manfaat Alokasi Dana Kepala Kampung**

Manfaat yang sangat besar, mulai dari pemenuhan dasar kebutuhan Air Bersih, rumah tangga sampai pada manfaat untuk menggerakkan perekonomian lokal, secara otomatis tingkat kepedulian dan partisipasi masyarakat akan lebih besar untuk mensukseskan program tersebut. Inilah sebenarnya tujuan yang diharapkan Pemerintah dengan mewajibkan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan anggaran ADKK bagi tiap Kepala Kampung.

**Peraturan Daerah Kabupaten Yahuklino Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kepala Kampung, dan Pengangkatan Perangkat Kampung, Ayat 20.** Dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kepala Kampung

#### **METODE PENELITIAN**

##### **Metode Penelitian**

Sesuai dengan situasi dan kondisi karakteristik permasalahannya yang ada, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif (Nazir, 1988; Koentjaraningrat, 1997) metode ini di gunakan karena peneliti ingin mengungkap permasalahan yang sifatnya actual dan factual, juga bertujuan untuk mengungkapkan dan menggambarkan gejala-gejala social yang berkaitan dengan fokus masalah dalam penelitian ini.

Metode penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif karena mengambil data melalui observasi, diamati, diwawancarai, dan menggunakan data dokumentasi.

##### **Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian ini hanya melibatkan untuk satu variabel atau konsep tunggal, yaitu peran pendampingan lokal kepala kampung dalam

pengelolaan ADKK di Kampung Walesakma dalam Wilayah Distrik Hilipuk Kabupaten Yahukimo apakah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 atau tidak? Dalam pengelolaan dananya dan sejauh mana pengelolaan (ADKK) yang dicapai oleh pemerintah kampung dalam proses pengelolaannya di Kampung Walesakma Distrik Hilipuk, yang meliputi kegiatan-kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan serta masyarakat kampung (desa) sudah terealisasi atau tidak?

Untuk menjawab mengkaji masalah yang di angkat dalam masalah penelitian ini, maka penelitian fokus penelitian menjadi hal yang sangat penting, karena fokus penelitian sangat besar peranannya dalam memandu dan mengarahkan penelitian yang peneliti lakukan

##### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kampung Walesakma Distrik Hilipuk Kabupaten Yahukimo adalah Peran Seorang Kepala kampung Dalam berperan aktif yang mempunyai kewenangan penuh untuk Pelaksanaan Pembangunan di kampung tersebut, dengan demikian peneliti ingin mencari tahu dan memastikan hasil kinerja dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

##### **Informan penelitian**

Informan dalam penelitian ini yang di ambil dari beberapa unsur, yaitu unsur aparat pemerintah kampung (Desa), unsur pengurus dan anggota Badan Musyawarah Kampung (BMK), unsur masyarakat adat papua yang ada di kampung, dan unsur kelembagaan kepala kampung lainnya. Jumlah kampung yang ada di kepala kampung walesakma Distrik Hilipuk Kabupaten Yahukimo adalah sebanyak 4 (empat) kampung, yaitu: kampung manmarek, kampung kwisia, kampung wolong, dan kampung solukamie, informan ini di tetapkan sebanyak orang, terdiri dari:

1. Kepala Kampung sebanyak 1 orang
2. Sekretaris kampung sebanyak 1 orang

3. Ketua badan musyawarah kampung (BMK) sebanyak 1 orang
4. Tokoh adat sebanyak 4 orang.
5. Tokoh masyarakat kampung sebanyak 3 orang

### **Instrumen Penelitian**

- a. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian sendiri yang menjadi utama sebagai kunci informasi.
- b. penelitian yang mengadakan observasi, wawancara terstruktur dan tak terstruktur.
- c. Peneliti sebagai *human instrument*, atau berfungsi sebagai sumber informasi agar mendapatkan fokus penelitian, dan memilih informasi demi sumber data untuk melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesiapan atas temuannya.

### **Sumber Data.**

Menjadi sumber data selama pelaksanaan penelitian ini yaitu dengan mengambil teknik *snowball sampling*, dengan memilih informan yang benar-benar mengetahui permasalahan akan meneliti masalah tersebut, diantaranya Kepala Distrik, Pegawai Distrik, setiap kepala kampung, Distrik Hilipuk Kabupaten Yahukimo dan berapa informasi lain yang berkedudukan tidak berstruktur telah memahami tentang realisasi implementasi pembangunan Kampung Walesakma di Distrik Hilipuk Kabupaten Yahukimo sebagai perhatian untuk mencari informasi dalam sumber data. Posisi peneliti sebagai subjek yang memiliki kedudukan penting untuk menentukan hasil penelitian yang valid.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah yang paling utama dalam penelitian ini, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa pengumpulan data, maka penelitian tidak bisa

mendapatkan data memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data berupa teks, dokumen, foto, artefak atau objek-objek lainnya yang di temukan di lapangan selama melakukan penelitian. Dengan demikian, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Memasuki Lokasi Penelitian (*Getting in*)  
Terlebih dahulu peneliti telah menentukan lokasi sebagai tempat penelitian, itulah sebabnya peneliti telah mengenal keadaan fisik yang ada pada lokasi penelitian.
- b. Selama Berada Di Lokasi Penelitian.  
Peneliti tiba di lokasi penelitian dimana telah ditetapkan sebagai daerah sasaran penelitian, maka peneliti pelapor dan memper-kenalkan diri kepada pejabat atau siapa saja sebagai memiliki informasi yang dibutuhkan peneliti, kemudian sampaikan apa yang menjadi tujuan kehadiran peneliti serta menunjukan semua dokumen yang berkaitan dengan surat ijin penelitian kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan peneliti.

### **Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini digunakan data kualitatif, (Miles dan Huberman: 2007:20). Penelitian kualitatif, analisis data di lakukan sejak awal sepanjang proses penelitian berlangsung. Data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami, dianalisis, dan di interpretasikan, kemudian menempatkan data menurut kerangka sesuai sistematika atau pengelompokan data sesuai dengan objek penelitian yaitu apa yang menjadi titik perhatian dalam penelitian ini.

### **Keabsahan Data**

Keabsahan data yang menggunakan dalam penelitian ini, banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena beberapa hal, yaitu subyektifitas penelitian merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif, alat penelitian yang

diandalkan adalah wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan ketika di lak

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil Singkat Kampung/Desa Walesakma

Secara geografis Kampung/Desa Walesakma dibatasi sebelah timur Kepala Kampung Sohondimu dengan jarak 30. 17 gm, sebelah barat Kepala Kampung Dindok dengan jarak 42. 19 gm pendekatan dengan kampung Dindok di bagian kalih sebelah adalah kepala kampung Homindipmu dengan jarak 62. 7 gm bagian utara kepala Kampung Kini bersama kantor Distrik Hilipuk dengan jarak 20.17 gm, sebelah bagian selatan Kepala Kampung Yaruhuk 85.54 gm, dan berdekatan dengan kampung Woruahaik dengan jarak 110. 56 gm. Di kampung Walesakma adalah berada di tengah-tengah 6 (enam kepala kampung tersebut).

### DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

Peran Pendampingan Lokal Kepala Kampung Dalam Pengelolaan (ADKK).

Peneliti Mengacu pada berbagai pendapat tentang kriteria pengukuran peran pendampingan lokal, termasuk pengelolaan alokasi dana desa/kepala kampung dan penyelenggaraan pemerintahan kampung, maka dalam penelitian ini digunakan sistem model yang dikemukakan oleh Etzioni (dalam Indrawijaya, 2000:227) mencakup empat kriteria, yaitu:

- a. Kriteria adaptasi, adalah kemampuan organisasi pemerintahan kampung untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
- b. Kriteria integrasi, yaitu tingkat kemampuan organisasi pemerintahan kampung untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan masyarakat dan berbagai macam organisasi atau lembaga masyarakat kampung lainnya.

### Rangkuman Hasil Wawancara Dan Aspek Yang Di Amati

Seorang warga Kampung Walesakma (pemangku adat) yang penulis wawancara, menambahkan bahwa kalau ada rencana untuk mengurus sesuatu urusan, misalnya meminta surat keterangan bepergian, maka terlebih dahulu saya hubungi aparat di rumahnya agar pada saat saya ke kantor kepala kampung, aparat tersebut telah siap untuk melayani saya”.

Kaitannya dengan waktu pelayanan, salah seorang warga kampung Manmarek yang sedang mengurus surat jalan di Kantor Kepala Kampung/Desa walesakma yang diwawancarai pada tanggal 14 Desember, 2017, menegaskan bahwa “mengurus surat keterangan kepergian saja, saya harus menunggu 2 (dua) hari baru bisa selesai, itu pun hanya tulis tangan, karena tidak ada mesin ketik”.

Bertolak dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan sementara bahwa kriteria produktivitas belum terealisasi secara optimal, terutama dari sisi pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini ada kaitannya dengan jumlah dan mutu aparat pemerintah kampung yang masih belum memadai serta ketersediaan fasilitas dan peralatan pendukung pelayanan yang masih sangat kurang memadai.

## PEMBAHASAN PENELITIAN

### Tugas-Tugas Pokok dan Fungsi Pendamping Lokal kepala kampung/Desa

Perbedaan mendasar model pendampingan paska ditetapkannya UU Desa adalah ada tuntutan terhadap para Pendamping Kepala Kampung/Desa untuk mampu melakukan transformasi sosial dengan mengubah secara mendasar pendekatan “kontrol dan mobilisasi” pemerintah terhadap kepala kampung/desa” menjadi pendekatan “pemberdayaan masyarakat desa”. Masyarakat desa dan pemerintah desa sebagai satu kesatuan *self-governing community* diberdayakan untuk mampu hadir sebagai komunitas mandiri. Dengan demikian, desa-desa didorong menjadi subyek penggerak pembangunan Indonesia dari pinggiran, sehingga mampu merealisasikan

salah satu agenda strategis prioritas Pemerintahan Jokowi-JK yaitu

“Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Peran pendampingan lokal kepala kampung dalam pengelolaan (ADKK) khususnya di kampung walesakma Distrik Hilipuk Kabupaten Yahukimo pada umumnya belum berjalan secara efektif dalam hal pemerintahan desa/kepala kampung tidak menetap di kampung walesakma sehingga pembangunan kampung tidak Nampak hal ini terjadi karena kepala kampung sendiri terpilih dari inisiatif Bupati Kabupaten Yahukimo itulah sebabnya pemerintahan kampung lebih memperhatikan kondisi kampung walesakma dan sekaligus di perhatikan masyarakat setempat. Kondisi ini dapat dilihat dari realitas hasil wawancara di mana ke lima kriteria keefektifan pengelolaan dana, pemerintahan kampung belum terimplementasi dengan maksimal.
2. Terdapat beberapa faktor yang turut menyumbangkan kurang Jelas dalam pembangunan desa sehingga pengelolaan Alokasi Dana Kepala Kampung/Desa dapat diidentifikasi sebagai faktor-faktor penghambat, yaitu: faktor aksesibilitas yang rendah, jumlah dan mutu SDM aparat pemerintah kampung yang kurang memadai artinya: mayoritas di kampung walesakma adalah rata-rata tamatan SD sehingga roda pemerintahan desa kurang maksimal dalam pembangunan kampung, sarana-prasarana dan fasilitas pemerintahan faktor ini terjadi karena kepala kampung sendiri tidak bisa membuat laporan

pertanggungjawaban dana tersebut bahkan kepala kampung sendiri tidak menetap di kampung hanya berfoya-foya di kota, hal ini peneliti mengetahui realita yang ada di kampung walesakma distrik hilipuk kabupaten yahukimo.

## **SARAN-SARAN**

Mengacu pada beberapa temuan dari hasil penelitian ini, maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai solusi dalam memecahkan masalah penelitian ini, di antaranya:

1. Peran pendampingan lokal kepala kampung dalam pengelolaan (ADKK) khususnya di kampung walesakma pada kenyataannya belum berjalan sesuai dengan harapan oleh masyarakat kampung sehingga saran kami pemerintahan kepala kampung perlu pembinaan khusus dan pengaderan dibutuhkan orang sarjana agar roda pemerintahan kampung bisa berjalan dengan baik.
2. Terdapat beberapa faktor yang turut menyumbangkan kurang efektifnya pengelolaan Alokasi Dana Kepala Kampung/Desa sehingga kami tekankan bahwa pemerintahan kampung harus memperhatikan dan menggunakan dana sebaik mungkin karena dana tersebut ada efek yang besar oleh sebab itu kami sebagai pemecah masalah sarankan bahwa kepada kepala kampung dan jajarannya yang ada di kampung walesakma bahwa dapat diidentifikasi sebagai faktor-faktor penghambat, yaitu : seperti faktor aksesibilitas yang rendah, jumlah dan mutu SDM aparat pemerintah kampung yang kurang memadai, sarana-prasarana dan fasilitas pemerintahan yang kurang memadai Kampung walesakma, khususnya di bidang pendidikan bagi pendampingan lokal dan aparat pemerintahan kampung yang

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bintarto, R. (1984). *Interaksi Desa - kota Dan Permasalahannya*. Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM, Yogyakarta.
- Gibson, James L., John M. Ivancevich dan James H. Donnely Jr, 1988, *Organisasi dan Manajemen (terjemahan)*, Erlangga, Jakarta.
- Indrawijaya Adam I. 2000, *Perilaku Organisasi*, Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Jones, Gareth R. 1994, *Organizational Theory, Text and Cases*. USA. Wesley Publishing Company, Reading Massachusets.
- Kaho, Yosef Riwu, 2001, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia* , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasim, A, 1993, *Pengukuran Efektivitas Dalam Organisasi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kimberly, JR., 1976, *Organizational Size and The Structuralist perspective A Review, Critique and proposal*, *Administrative Science Quarterly*.
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, P.T. Gramedia, Jakarta.